

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguraikan bahwa keterbukaan terbatas Jepang terhadap tenaga kerja asing bukan hanya respons terhadap krisis demografi, tetapi bagian dari strategi ekonomi yang dirancang untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kebijakan Specified Skilled Worker (SSW) dan Visa *Ikusei Shuro* (ESDP) menunjukkan bahwa Jepang tidak serta merta meliberalisasi migrasi, melainkan menerapkan sistem yang dikontrol secara ketat untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing yang diterima memiliki kontribusi langsung terhadap sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Pendekatan ini mencerminkan karakteristik side-door migration, yang memungkinkan migrasi tenaga kerja tanpa memberikan jalur menuju integrasi sosial atau kewarganegaraan.

Dalam konteks realisme neoklasik, kebijakan keterbukaan Jepang terhadap tenaga kerja asing dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan eksternal berupa kompetisi global tenaga kerja dan krisis demografi, yang kemudian difilter melalui variabel domestik seperti budaya strategis, persepsi elite politik, dan kapasitas institusional. Jepang menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas industri sekaligus menjaga stabilitas sosial domestik, sehingga keterbukaan yang dilakukan tetap dalam batasan yang ketat. Meskipun terdapat desakan internasional untuk lebih membuka sistem migrasi, Jepang tetap memilih pendekatan selektif, mencerminkan kalkulasi strategisnya dalam mengelola migrasi sebagai instrumen ekonomi.

Dampak keterbukaan terbatas ini terlihat pada sektor-sektor padat karya seperti perawatan kesehatan, konstruksi, dan manufaktur, di mana tenaga kerja asing berkontribusi terhadap stabilisasi produktivitas ekonomi. Namun, meskipun kebijakan ini berhasil mengisi kekosongan tenaga kerja, integrasi sosial tetap menjadi tantangan. Resistensi budaya terhadap kehadiran pekerja asing tercermin dalam syarat ketat yang diterapkan pada program migrasi. Hambatan bahasa, birokrasi yang kompleks, serta ketidakjelasan jalur menuju residensi permanen menjadi faktor yang membatasi efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang. Selain aspek ekonomi, keterbukaan terbatas Jepang juga berkaitan erat dengan strategi diplomasi ekonomi. Jepang memanfaatkan sistem migrasi selektif ini untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara sumber tenaga kerja seperti Indonesia dan Vietnam. Dengan mekanisme ini, Jepang tidak hanya mengelola arus masuk tenaga kerja asing, tetapi juga memposisikan kebijakan migrasi sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi regional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterbukaan Jepang terhadap tenaga kerja asing tidak semata-mata terkait dengan aspek domestik, tetapi juga menjadi bagian dari perhitungan strategis dalam hubungan internasionalnya.

Kesimpulannya, kebijakan migrasi Jepang adalah bentuk keterbukaan terkendali yang mempertimbangkan kepentingan ekonomi, stabilitas sosial, dan kapasitas institusional. Dengan pendekatan ini, Jepang berhasil menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja dengan perlindungan struktur sosial domestiknya. Meskipun model keterbukaan terbatas ini efektif dalam jangka pendek, penelitian

lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi apakah sistem migrasi ini cukup adaptif dalam menghadapi tantangan demografi dan ekonomi jangka panjang.

4.2 Saran untuk Penelitian Berikutnya

Penelitian berikutnya dapat lebih mendalam menganalisis efektivitas implementasi kebijakan migrasi Jepang, khususnya dalam aspek perlindungan tenaga kerja asing dan dampak sosial jangka panjangnya. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana program SSW dan Ikusei Shuro berjalan dalam praktik, serta apakah regulasi yang diterapkan benar-benar melindungi kepentingan tenaga kerja asing. Evaluasi terhadap mekanisme kerja dan asimilasi sosial tenaga kerja asing di Jepang akan memberikan wawasan lebih luas mengenai keberlanjutan kebijakan ini. Selain itu, penelitian lanjutan dapat melakukan perbandingan kebijakan migrasi Jepang dengan negara lain yang menghadapi tantangan serupa, seperti Korea Selatan, Jerman, atau Taiwan. Studi komparatif ini akan membantu memahami apakah model keterbukaan terbatas Jepang lebih efektif dibandingkan pendekatan yang lebih liberal atau restriktif.

Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi dampak keterbukaan terbatas terhadap hubungan diplomasi ekonomi Jepang dengan negara-negara asal tenaga kerja. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan migrasi berfungsi sebagai instrumen dalam membangun hubungan internasional dan mengelola kerjasama tenaga kerja. Dengan perspektif yang menggabungkan ekonomi, sosial, dan hubungan internasional, penelitian berikutnya dapat memberikan analisis yang lebih holistik mengenai strategi migrasi Jepang.